Resume Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Nama : Mutiara Adhani Chaidir

Nim : 10200120207

Pembahasan :

BAB 1 HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan hukum yang meneliti sebuah masalah yang ada didalam negara tersebut. Meskipun ada beberapa bagian ilmu tentang pengetahuan yang membuat aturan didalam negara tersebut.

Tata negara berarti sistem penataan negara yang berisi ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan mengenai substansi norma kenegaraan. Dengan kata lain, Hukum Tata Negara merupakan cabang Ilmu Hukum yang membahas mengenai tata struktur kenegaraan, mekanisme hubungan antar struktur kenegaraan, serta mekanisme hubungan antara struktur negara dengan warga negara.

Istilah Hukum Tata Negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht yang artinya adalah hukum negara. Staats berarti negara-negara sedangkan recht berarti hukum. Hukum negara kepustakaan Indonesia diartikan menjadi hukum tata negara. Mengenai definisi hukum tata negara masih terdapat perbedaan pendapat diantara ahli hukum tata negara. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh masing-masing ahli berpendapat bahwa apa yang mereka anggap penting akan menjadi titik berat perhatiannya dalam merumuskan pengertian dan pandangan hidup yang berbeda. Adapun pengertian Hukum Tata Negara menurut beberapa ahli, diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut Apeldoorn

Hukum Tata Negara dapat dilihat dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas hukum tata negara juga meliputi hukum administrasi negara, sedangkan dalam arti sempit hukum tata negara menunjukkan organisasi-organisasi yang memegang kekuasaan pemerintahan dan batas kekuasaan yang dimiliki pemerintahan tersebut.

2. Menurut Wade and Philips

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat perlengkapan negara, meliputi tugas dan hubungan antara perlengkapan negara tersebut.

3. Menurut Paton

Hukum Tata Negara adalah hukum mengenai alat dan tugas serta wewenang yang dimiliki alat perlengkapan negara. Pendapat yang serupa juga dikemukakan oleh J.R.Stellinga yang menyatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban alat perlengkapan negara serta hak dan kewajiban warga negara.

4. Kusumadi Pudjosewojo

Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukkan masyarakat Hukum yang atasan maupun yang bawahan, serta tingkatan-tingkatannya

(hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu, beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.

Tujuan Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara memiliki tujuan tersendiri diantaranya :

1. Mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca amandemen keempat.
2. Menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia.
3. Membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara.
4. Menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara.
5. Mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia.

Fungsi Hukum Tata Negara

Adapun fungsinya hukum tersebut dapat digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Selain itu, menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin, wadah penggerak pembangunan.

Hukum Tata Negara ditinjau secara kritis sebagai daya kerja hukum. Hukum ini tidak semata-mata menjadi pengawasan terhadap aparat penegak hukum.

Klasifikasi Hukum Tata Negara

Klasifikasi hukum (klasik) menurut Ulpianus yaitu dengan kriteria, tersebut maka menurut Ulpianus, Hukum dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

- Privat Recht
- Public Recht

Penggolongan tersebut dalam kenyataannya tidak dapat dipungkiri, namun prakteknya mengalami kesulitan, diantaranya :

- Sulit menentukan kapan suatu kepentingan itu dikelompokkan sebagai kepentingan individu atau kepentingan umum. Contohnya : perjanjian yang melibatkan banyak orang.
- Ada kalanya suatu kaidah hukum bila dilihat dari sifatnya mengatur hubungan yang bersifat public, tetapi dalam kenyataannya mengatur hubungan yang bersifat privat, contohnya : pencabutan hak milik atas berikut barang-barang yang ada di atasnya.

Menurut Prof. Sudiman Kartohadiprojo, Hukum tata negara dari suatu negara tidak terlepas dari perkembangan politik yang ada di negara yang bersangkutan.

Ruang Lingkup Hukum Tata Negara

Adapun ruang lingkup pengaturan hukum tata negara antara lain meliputi, bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, corak pemerintahan, sistem pendelegasian kekuasaan negara, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, wilayah negara, hubungan antara rakyat dengan negara, cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan, dasar negara dan ciri-ciri lahir kepribadian negara termasuk lagu kebangsaan bahasa nasional lambang bendera dan lain sebagainya.

BAB 2 SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA

Pengertian Sumber Hukum

Sumber hukum ialah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, artinya yaitu aturan-aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata.

Menurut R. Suroso dalam bukunya pengantar ilmu hukum (2005:118). Mengenai macam-macam sumber hukum Sudikno menyebutkan sumber hukum dibagi menjadi 2 yaitu sumber hukum formil dan sumber hukum material.

1. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal.
2. Sumber hukum material merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (kriminologi lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis.

Pada umumnya para pakar membedakan sumber hukum kedalam kriteria sumber hukum materil dan sumber hukum formal.

a. Sumber hukum materi

Ialah tempat dimana hukum itu diambil sumber hukum materi merupakan faktor yang membantu pembentuk hukum misalnya hubungan sosial politik, situasi sosial ekonomi, pandangan keagamaan dan kesusilaan hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis contoh : seorang ahli ekonomi akan mengatakan bahwa kebutuhan-kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum. Sedangkan bagi seorang ahli kemasyarakatan (sosiologi) akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang menjadi didalam masyarakat.

b. Sumber hukum formal

Yaitu sumber hukum yang mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya dinamai dengan sumber hukum formal karena semata-mata mengingatkan cara untuk mana timbul hukum positif, dan bentuk dalam mana timbul hukum positif, dengan tidak lagi mempersoalkan asal usul dari isi aturan-aturan hukum tersebut

Sumber-sumber yang bersifat Hukum dan Sosial

Sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat social. Yang pertama merupakan sumber-sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga sesara langsung bisa melahirkan atau menciptakan hukum. Adapun yang kedua merupakan sumber yang tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh hukum, sehingga tidak secara langsung bisa diterima sebagai hukum (Fitzgerald, 1966: 109).

Apabila kita melihatnya secara demikian maka yang kita jadikan tolak ukur adalah keabsahan secara hukum dari substansi yang dihasilkan oleh sumber hukum adalah ipso jure. Yang dengan sendirinya sah, sedang yang lain tidak dan dengan lain demikian hanya bisa disebut sebagai sumber-sumber kesejahteraan saja. Sebagai demikian, maka sumber social ini dapat disebut sebagai sumber bahan dan kekuatannya tidak otoritas melainkan hanya persuasif (Fitzgerald, 1966 : 102, 110).

Situasi yang dihadapi oleh sumber-sumber hukum sebagaimana dikemukakan diatas tidak terlepas dari perkembangan masyarakat sendiri. Dumika telah dibicarakan model dikhotomi dari hard, yaitu yang membagi masyarakat kedalam resim tatanan primer dan sekunder. Perbedaan ini menggerakkan kepada pernyataan tentang adanya masyarakat dengan ciri-ciri sosial saja dan masyarakat dengan ciri-ciri hukum atau masyarakat pra hukum dan masyarakat yang sudah mengenal hukum. Perbedaan dalam sumber-sumber yang bersifat social dan hukum itu tentulah berada pada tingkat perkembangan masyarakat yang sudah mengenal hukum perbedaan dalam sumber-sumber yang bersifat social hukum itu tentulah berada pada tingkat perkembangan masyarakat yang sudah diketahui perbedaan tajam antara yang sosial dan yang hukum dengan segala perkaitannya dengan demikian pula perbedaan sumber-sumber yang bersifat hukum dan sosial tentunya tidak berlaku dalam masyarakat pra hukum tersebut.

BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM

Pengertian Asas Hukum menurut beberapa pakar hukum

1. Asas hukum Satiptjo Rohardjo (Rachmadi Usman, 2000:7)
Menyatakan bahwa, asas hukum merupakan “jantung” peraturan hukum. Ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas hukum tersebut. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Kalau demikian dengan adanya asas hukum, hukum itu bukan sekedar sekumpulan peraturan-peraturan, karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis, merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
2. Roeslan saleh (Rachmadi Usman, 2000:8)
Yang mengutip kata-kata Paul Scholten mengartikan bahwa asas asas hukum sebagai pikiran-pikiran dasar yang sebagai aturan bersifat umum menjadi fundemen ari suatu sistem hukum
3. Bellefroid (Sudikno Mertokusumo, 2010:42)

Menyatakan bahwa asas hukum umum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang lebih umum. Asas hukum umum itu merupakan pengendapan hukum positif dalam suatu masyarakat.

4. Van Eikema Hommes (Sudikno Mertokusumo, 2010:2)

Asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma konkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

BAB 4 SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA

Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme

Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar suatu negara). Konstitusi juga dapat diartikan sebagai undang-undang dasar suatu negara.

Dikutip dari Encyclopaedia Britannica, Konstitusi adalah badan doktrin dan praktis yang membentuk prinsip perorganisasian fundamental negara politik.

Dilansir dari Kiddle.co, konstitusi suatu negara (negara bagian) adalah jenis dokumen hukum khusus yang menjelaskan bagian pemerintahnya seharusnya bekerja.

Secara sederhana konstitusi mengemukakan antara lain:

1. Bagaimana para pemimpin dipilih dan berapa lama mereka akan bertugas
2. Bagaimana undang-undang baru dibuat dan hukum lama harus diubah atau dihapus berdasarkan hukum
3. Seperti apa orang yang diizinkan untuk memilih.
4. Hak-hak apa yang akan dijamin
5. Bagaimana konstitusi dapat diubah
6. Dan lain-lain

Konstitusionalisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan dan hak-hak individu.

Maksud konstitusionalisme adalah perilaku politik sesuai dengan konstitusi. Sejak abad ke 18, elemen penting dalam konstitusionalisme modern adalah doktrin pemerintahan terbatas dibawah hukum dasar tertulis.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (biasa disingkat UUD 1945, UUD RI 1945, atau UUD '45) adalah konstitusi Republik Indonesia. Dalam bentuknya yang dikenal pada saat ini, UUD 1945 mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 1949, dan telah diamandemen sebanyak empat kali setelahnya.

UUD 1945 mulai berlaku sebagai konstitusi Republik Indonesia setelah disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya ditangguhkan seiring disahkannya kesepakatan Konferensi Meja Bundar, yang memasukkan RI sebagai bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS) yang memiliki Konstitusinya sendiri.

Setelah RIS dibubarkan dan diganti dengan RI, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950). UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi RI pada tanggal 5 Juli 1959, seiring dengan berlakunya dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Selepas Reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen dari tahun 1999 dan 2002.

Setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan peninjauan yudisial atas Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945.

Perkembangan RIS

Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan berdaulat adalah Negara Hukum demokratis yang berbentuk federal. RIS dilakukan oleh pemeribintahan federal bersama parlemen dan senat. Wilayahnya meliputi seluruh daerah Indonesia yang terdiri atas :

1. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, dan Negara Sumatera Selatan.
2. Kesatuan politik yang berkebangsaan yaitu Jawa Tengah, Bangka Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.
3. Daerah-daerah lainyang bukan daerah bagian.

Berakhirnya RIS

Pada tanggal 15 Agustus 1950, presiden Soekarno menandatangani Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan. Undang-Undang Dasar Sementara {UUDS 1950} yang telah ditandatangani oleh presiden Soekarno adalah konstitusi RIS {mengubah beberapa pasal yang tidak sesuai dengan bentuk negara kesatuan}

Setelah ditandantangani presiden Soekarno, UUDS 1950 mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1950 dan sekaligus menandai secara resmi pembubaran RIS dan kembali ke NKRI. Kembalinya NKRI, sebagaimana bunyi Bab 1 Pasal 1 UUDS 1950, menyatakan bahwa RI yang merdeka dan berdaulat adalah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pada pasl 2 dipertegas lagi bahwa RI meliputi seluruh wilayahag Indonesia.

Pada tanggal 15 Agustus 1950, pemangku jabatan presiden Republik Indonesia Assaat menyerahkan kekuasaan kepada presiden Soekarno. Dengan demikian, pada tanggal 17 Agustus 1950, secara resmi RIS telah dibubarkan dan sebagai gantinya, berdirilah NKRI, serta digantinya Konstitusi RIS dengan UUDS 1950, Indonesia telah kembali ke Negara Kesatuan dengan melaksanakan sistem Demokrasi Liberal. Setelah negara Indonesia berhasil berbenah diri dari segala macam bentuk gangguan keamanan dan telah berhasil kembali ke NKRI pada tanggal 28 September 1950, Indonesia diterima menjadi anggota PBB yang ke – 60.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, atau dikenal dengan UUDS 1950, adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959.

UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.

Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, tetapi Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

Undang-Undang 1945- Sekarang

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.

Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia Sembilan yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah Pembukaan UUD 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya" maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah Pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Pengesahan UUD 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah rancangan UUD 1945 Indonesia disusun pada masa Sidang Kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Nama Badan ini tanpa kata "Indonesia" karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatra ada BPUPKI untuk Sumatra. Masa Sidang Kedua tanggal 10-17 Juli 1945. Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945, dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap UUD 1945.

Periode perubahan Undang-undang Dasar 1945

Perubahan (amandemen) 1

Perubahan atau Amandemen UUD 1945 pertama dilakukan tanggal 14-21 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR.

Amandemen tersebut menyempurnakan sembilan pasal, yakni Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21.

Terdapat dua perubahan fundamental yang dilakukan, yaitu:

Pergeseran kekuasaan dengan membentuk undang-undang dari Presiden ke DPR.

Pembatasan masa jabatan presiden selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, untuk satu kali masa jabatan.

Perubahan (amandemen) 2

Perubahan UUD 1945 kedua terjadi pada 7-18 Agustus 2000 dalam Sidang Tahunan MPR. Pada perubahan UUD 1945 tersebut ada 15 pasal perubahan atau tambahan, serta tambahan dan perubahan enam bab.

Terdapat delapan perubahan penting, yaitu: Otonomi daerah atau desentralisasi

Pengakuan serta penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa dan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Penegasan fungsi dan hak DPR Penegasan NKRI sebagai sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia Sistem pertahanan dan keamanan negara Pemisahan struktur dan fungsi TNI serta Polri Pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.

Perubahan (Amandemen) III

Perubahan UUD 1945 ketiga berlangsung dari tanggal 1-9 November 2001 dalam Sidang Umum MPR. Terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan tiga bab tambahan.

Terdapat 10 perubahan mendasar, yaitu:

1. Penegasan Indonesia sebagai negara demokratis berdasar hukum berbasis konstitusionalisme.
2. perubahan struktur dan kewenangan MPR
3. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat.
4. Mekanisme pemakzulan presiden dan atau wakil presiden
5. Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah
6. Pemilihan umum
7. Pembaharuan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan
8. Perubahan kewenangan dan proses pemilihan serta penetapan hakim agung.
9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi
10. Pembentukan Komisi Yudisial

Perubahan (Amandemen) IV

Perubahan UUD 1945 keempat berlangsung dari tanggal 1-11 Agustus 2002 pada Sidang Umum MPR.

BAB 6 KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN HUKUM TATA NEGARA

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis (*constituer*) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.^[1] Sehingga konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, dengan demikian suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok (*fundamental*) mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yaitu negara.

Bertolak dari konsepsi tersebut, maka secara umum istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan yang tidak tertulis.

Pengertian konstitusi, dalam prakteknya dapat berarti lebih luas daripada pengertian Undang-Undang Dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar.

L.J. Van Apeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau *gronwet* (Undang-undang Dasar) adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan *constitution* (konstitusi) memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Sementara Sri Soemantri M, dalam disertasinya mengartikan konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar. Penyamaan arti dari keduanya ini sesuai dengan praktek ketatanegaraan di sebagian besar negara-negara di dunia termasuk di Indonesia.

Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3 yaitu:

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirklichkeit*. Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis.
2. *Die Verselbstandigte rechtsverfassung*. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis.
3. *Die geshereiben verfassung*. Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
4. Dari pendapat Herman Heller tersebut dapatlah kita simpulkan bahwa jika Undang-Undang Dasar dihubungkan dengan konstitusi, maka Undang-Undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi yang tertulis saja. Disamping itu konstitusi itu tidak hanya bersifat yuridis semata, tetapi mengandung pengertian sosiologis dan politis

Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian:

1. Dalam pengertian yang luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (*droit constitutionnelle*), baik yang tertulis ataupun tidak tertulis ataupun campuran keduanya;
2. Dalam pengertian sempit (terbatas), konstitusi berarti piagam dasar atau Undang-undang Dasar (*loi constitutionnelle*), ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Misalnya UUD RI 1945, Konstitusi USA 1787.

Pembagian dan Klasifikasi Konstitusi

Carl Schmitt dan K.C wheare dalam bukunya “Verfassungslehre” membagi konstitusi dalam empat bagian antara lain:[6]

1. Konstitusi absolut (absolut begriff der verfassung)
2. Konstitusi relatif (relative begriff der verfassung)
3. Konstitusi positif (positive begriff der verfassung)
4. Konstitusi ideal (ideal begriff der verfassung)

Nilai Konstitusi

Karl Loewenstein mengadakan suatu penyelidikan mengenai apa arti dari suatu konstitusi tertulis (UUD) dalam suatu lingkungan nasional, terutama bagi rakyat biasa sehingga membawanya kepada tiga jenis penilaian konstitusi sebagai berikut:[7]

1. Nilai Normatif
2. Nilai ini diperoleh apabila penerimaan segenap rakyat dari suatu negara terhadap konstitusinya benar-benar secara murni dan konsekuen, konstitusi itu ditaati dan dijunjung tinggi tanpa adanya penyelewengan sedikitpun.
3. Nilai Nominal
4. Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannyakurang sempurna. Sebab-sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.
5. Nilai Semantik
6. Suatu konstitusi bernilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum berlaku namun dalam kenyataannya hanya sekedar untuk memberikan bentuk dari tempat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi tersebut hanyalah sekedar suatu istilah belaka, sedang dalam pelaksanaannya hanyalah dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

Sifat Konstitusi

1. Bersifat Luwes/Fleksibel
Konstitusi yang bersifat luwes atau fleksibel adalah konstitusi yang baik, karenanya dapat dengan mudah menerima perubahan apabila diperlukan sekali, serta dengan mudah pula dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.
2. Tertulis dan Tidak Tertulis
 - a. Bersifat tidak tertulis:
Suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal,. Seperti konstitusi yang berlaku di Inggris, Israel, dan New Zeland.
 - b. Bersifat tertulis:
Konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal.

Perubahan Konstitusi

Secara garis besar konstitusi dapat berubah atau diubah melalui dua jalan, yakni melalui cara berikut:

1. Jalan yuridis formal.

Jalan pertama, dilakukan sesuai dengan ketentuan formal mengenai perubahan konstitusi yang terdapat di dalam konstitusi itu sendiri dan mungkin diatur dalam peraturan perundangan lain.

2. Jalan non yuridis formal atau jalan politis.

Perubahan konstitusi tersebut biasanya terjadi Karena sebab tertentu atau keadaan khusus yang mendorong terjadinya perubahan konstitusi. Perubahan demikian dapat berupa perubahan total atau sebagian ketentuan saja sesuai kebutuhan. Perubahan konstitusi secara politis ini kalau berjalan dan dapat diterima oleh segala lapisan masyarakat, maka perubahan demikian secara yuridis adalah sah. Atau dengan kata lain, perubahan konstitusi secara de facto yang kemudian dapat diterima oleh seluruh rakyatnya, maka konvensi statusnya berubah menjadi de jure.

BAB 7 ORGAN DAN FUNGSI KEKUASAAN NEGARA

Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain.

Kekuasaan adalah sarana yang bisa digunakan untuk apa saja. Ia ibarat pisau dapur; yang bisa kita digunakan untuk menyelesaikan urusan persiapan masak-memasak di dapur; tetapi oleh para penjahat bisa digunakan untuk membunuh orang.

FUNGSI KEKUASAAN

Kelembagaan Negara di Indonesia dapat di bagi menjadi tiga yang masing-masing mempunyai kekuasaan khusus, yaitu :

1. Kekuasaan Legislatif (Rulemaking function / pembuatan undang-undang).
2. Kekuasaan Eksekutif (Rule application function / pelaksanaan undang-undang).
3. Kekuasaan Yudikatif (Rule adjudication function / pengadilan atas pelanggaran undang-undang.